

ASPEK HUKUM PASAR MODAL INDONESIA

M. Irsan Nasarudin, SH. - Indra Surya, SH., LL.M.
Ivan Yustiavandana, SH., LL.M.
Arman Nefi, SH., MM. - Adiwarman, SH. S.Sos.



diterbitkan atas kerjasama dengan
Kajian Pasar Modal & Keuangan
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar Isi

Sambutan Dekan FH-UI	v
Sambutan Ketua BAPEPAM	vii
Sekapur Sirih	ix
Daftar Isi	xiii
Bab 1 TINJAUAN UMUM TENTANG PASAR MODAL	1
Latar Belakang	1
Hakikat Pasar Modal	10
Pasar Modal dan Pasar Uang	13
Pasar Modal	13
Pasar Modal Syariah	16
Pasar Uang	19
Peranan Pasar Modal Bagi Pembangunan Ekonomi	21
Perkembangan Ekonomi Dunia	21
Peluang dan Tantangan	27
Pembangunan Ekonomi Nasional	31
Pasar Modal dan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN)	37
Hukum dan Pasar Modal	42
Sumber Hukum Pasar Modal	42
Regulasi	43
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	45
Himpunan Peraturan Bapepam	50

Bab 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL	53
Sejarah Pasar Modal Dunia	53
Sebelum Tahun 1900	53
Sesudah Tahun 1900	56
Sejarah Pasar Modal Indonesia	62
Periode Permulaan (1878-1912)	62
Periode Pembentukan Bursa (1912-1925)	63
Periode Awal Kemerdekaan (1925-1952)	64
Periode Kebangkitan (1952-1976)	67
Periode Pengaktifan Kembali (1977-1987)	68
Periode Deregulasi (1987-1995)	71
Periode Kepastian Hukum (1995-sekarang)	73
Periode Menyongsong Independensi Bapepam	74
 Bab 3 PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA	 77
Pengembangan Pasar Modal Indonesia	77
Pengembangan Institusi Pasar Modal	86
Pengembangan Bursa Efek Jakarta	86
Lembaga Kliring dan Penjaminan	87
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	88
Perusahaan Efek	88
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	88
Lembaga Penunjang Pasar Modal	88
Profesi Penunjang Pasar Modal	89
<i>Good Corporate Governance</i> dan Pengembangan Pasar Modal	95
Kerja Sama Internasional Otoritas Pasar Modal	109
 Bab 4 PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM PASAR MODAL	 113
Struktur Kelembagaan Pasar Modal	113
Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)	115
Pemeriksaan dan Penyidikan oleh Bapepam	117
Struktur Organisasi Bapepam	121
Bursa Efek	124
Bursa Efek Jakarta	127
Bursa Efek Surabaya	129
Karakteristik Bursa Efek	130



Pencatatan Saham	131
Mekanisme Perdagangan	134
Jakarta Automated Trading System (JATS)	138
Online Trading System	139
Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading)	140
Perusahaan Efek	141
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) & Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)	148
Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	148
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)	150
Emiten, Perusahaan Publik, dan Reksa Dana	151
Emiten	151
Perusahaan Publik	154
Reksa Dana	155
Investor	165
Investor Domestik	167
Investor Asing	168
Tujuan Berinvestasi	169
Lembaga Penunjang Pasar Modal	171
Biro Administrasi Efek	171
Kustodian	172
Wali Amanat (Trustee)	173
Penasihat Investasi	174
Pemeringkat Efek (Rating Company)	176

Bab 5 INSTRUMEN PASAR MODAL	181
Instrumen Utang (Obligasi)	182
Instrumen Penyertaan (Saham)	188
Instrumen Efek Lain	193
Indonesian Depository Receipt (IDR)	193
Efek Beragun Aset	196
Indeks Saham	202
Instrumen Efek Derivatif	203
Right	203
Option	204
Warrant (Waran/Surat Saham)	204



Pasar Modal Syariah	205
Instrumen Pasar Modal Syariah	205
Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah)	205
Instrumen Penyertaan (Saham)	207
Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah)	211
Bab 6 PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA	213
Tinjauan Umum	213
Aspek Hukum Penawaran Umum	215
Penawaran Umum Obligasi	219
Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum	221
Bab 7 TRANSPARANSI PASAR MODAL	225
Arti Penting Transparansi	225
Manfaat Keterbukaan Informasi	231
Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal	233
Keterbukaan Merupakan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	236
Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran	238
Bab 8 BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU	241
Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	241
Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	244
Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu	247
Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	248
Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	249
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham	251
Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	253
Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	254
Bab 9 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL	257
Kejahatan di Bidang Pasar Modal	257



Pasar Modal Syariah	205
Instrumen Pasar Modal Syariah	205
Instrumen Utang (Obligasi Syariah Mudharabah)	205
Instrumen Penyertaan (Saham)	207
Instrumen Lain (Reksa Dana Syariah)	211
Bab 6 PENAWARAN UMUM DAN ASPEK HUKUMNYA	213
Tinjauan Umum	213
Aspek Hukum Penawaran Umum	215
Penawaran Umum Obligasi	219
Kondisi Emiten Setelah Penawaran Umum	221
Bab 7 TRANSPARANSI PASAR MODAL	225
Arti Penting Transparansi	225
Manfaat Keterbukaan Informasi	231
Prinsip Transparansi dalam Peraturan Pasar Modal	233
Keterbukaan Merupakan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	236
Ketentuan Sanksi Atas Pelanggaran	238
Bab 8 BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU	241
Pengertian Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	241
Peraturan Nomor IX.E.1. dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	244
Modus Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu	247
Unsur Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	248
Syarat Melakukan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	249
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham	251
Tanggung Jawab Perseroan dan Pengurus Atas Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	253
Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	254
Bab 9 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL	257
Kejahatan di Bidang Pasar Modal	257



Landasan Yuridis	257
Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	259
Jenis-jenis Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	259
Tindakan Lain yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal	271
Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	272
Kewenangan Bapepam untuk Melakukan Penegakan Hukum	276
Perlindungan Hukum Bagi Investor	278
 Daftar Pustaka	 281
Lampiran	287
Tentang Penulis	393